

**KEMITRAAN PERTAHANAN AUSTRALIA-AMERIKA SERIKAT DALAM  
UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN REGIONAL DI INDO-PASIFIK  
(STUDI KASUS AUKUS)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

**M. DAFFA AL HAQ RAYNANDA PUTRA**

E061181342

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KEMITRAAN PERTAHANAN AUSTRALIA-AMERIKA SERIKAT DALAM  
UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN REGIONAL DI INDO-PASIFIK  
(STUDI KASUS AUKUS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin**

**OLEH:**

**M. DAFFA AL HAQ RAYNANDA PUTRA**

**E061181342**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEMITRAAN PERTAHANAN AUSTRALIA-AMERIKA  
SERIKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN  
REGIONAL DI INDO-PASIFIK (STUDI KASUS AUKUS)

N A M A : MUH. DAFFA AL HAQ RAYNANDA PUTRA

N I M : E061181342

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 7 Desember 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,

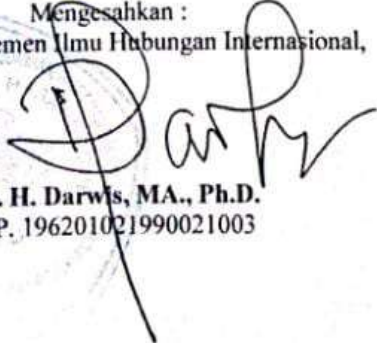
Pembimbing II,

  
Agussalim, S.IP, MIRAP.  
NIP. 197608182005011003

  
Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR  
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

  
Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEMITRAAN PERTAHANAN AUSTRALIA-AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN REGIONAL DI INDO-PASIFIK (STUDI KASUS AUKUS)

N A M A : MUH. DAFFA AL HAQ RAYNANDA PUTRA

N I M : E061181342

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 6 Desember 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Drs. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Agussalim, S.IP, MIRAP

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M. Daffa Al Haq Raynanda Putra  
NIM : E061181342  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **Kemitraan Pertahanan Australia-Amerika Serikat dalam Upaya Mewujudkan Keamanan Regional di Indo-Pasifik (studi Kasus AUKUS)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia disanksi untuk perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Desember 2022

Yang menyatakan,



(M. Daffa Al Haq Raynanda Putra)

## KATA PENGANTAR

Segala Puja & Puji penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT, Tuan Semesta Alam, Sang Pemilik seluruh kehidupan dan kematian di jagat raya, Allah Abraham, Allah Musa, Allah Muhammad yang telah melimpahkan berkat kasih dan sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dan mampu menyempurnakan langkah awal dalam perjalanan perguruan tinggi penulis; S1. Satu yang pasti apa yang penulis lakukan hari ini tidak akan lepas dari janji yang penulis ikrarkan kepada-Mu. *Inna Sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Robbil Alamin.*

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tentunya menemui begitu banyak tantangan yang pada akhirnya mampu teratasi. Skripsi ini terselesaikan dengan baik disertai afirmasi positif dari orang-orang yang selalu berada di depan, samping dan belakang penulis. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu serta menemani proses penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin 2022-2026: Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc dan Rektor Universitas Hasanuddin 2014-2022: Ibu Prof. Dr. Dwia AriesTina Palubuhu., beserta jajarannya. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si. dan Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Pak Agus, Kak Bama dan Kak Aca, ketiga dosen yang penulis paling gemari dan paling sering penulis ambil mata kuliahnya, yang banyak membuka cakrawala sudut pandang penulis tentang ilmu hubungan internasional dan membentuk struktur penulisan akademik penulis. Siapa yang sangka dipertemukan takdir menjadi dosen pembimbing skripsi penulis.

3. Kak Jannah selaku dosen PA penulis, segenap jajaran dosen ilmu hubungan internasional FISIP UNHAS; Pak Darwis, Kak Biondi, Pak Bur, Pak Munjin, Pak Imran Hanafi, Pak Husain Abdullah, Pak Nasir Badu, Bu Seniwati, Bu Puspa, Pak Ishaq, Kak Sawing, Kak Gego, Pak Aspi (Alm.), Pak Adi dan Kak Atiqah. Serta para dosen non-HI yang menemani perjalanan S1 penulis: Pak Neil sebagai salah satu pendidik yang berpengetahuan terluas, Pak Anto, Kak Dayat, Kak Icul dan para dosen yang penulis tidak dapat tulis satu-persatu. Staf pegawai: Pak Ridho, Pak Herman, Bu Rahma, Bu Tia, Bu Ija dan staf pegawai UNHAS yang lain.

4. Ibunda penulis, Farida Sari. *Strongest Creature, Highest Benchmark*, seorang Ibu sekaligus Ayah. Sebuah Cinta. Tidak lupa kepada Ayahanda, Zainuddin Sardjimin.

5. Keluarga besar penulis yang dengan segala fenomenanya membentuk penulis hari ini. Ibu Lili, Bapak Hafid dan keluarga. Bapak Farid dan keluarga. Bapak Dade dan keluarga. Om Iwan, Bunda Eka dan keluarga. Papi Anda dan keluarga. Om Rio dan keluarga. Pak Unding, Mama Sarti dan keluarga. Serta keluarga besar lain yang penulis tidak dapat tulis satu persatu.

6. Saudara-Saudara KA penulis. Sebuah MILIU. Semoga kita selalu berada di jalur yang tepat agar TSA senantiasa memberkati dan membimbing perjalanan kita. *This knowledge is for this journey!* Tidak lupa kepada adik-adik GU yang terus bergerak naik, dan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk tidak kalah meng-*upgrade* kemampuan, pantaskanlah diri kalian.

7. Para sahabat penulis selama masa perkuliahan. Para *associate* kantor urusan Internasional yang menemani penulis dalam hal akademik dan non-akademik: Mario Kaishar Fahrevi, Dhiya Fadhillah Rakhman dan Latifah Ukhra Rasyid. Kalian mungkin mendengarkan setidaknya ¼ kisah hidup penulis yang artinya lebih banyak dari 95% orang yang pernah penulis temui. Kalian adalah orang-orang baik, dan akan menjadi bagian tersendiri dalam hidup penulis.

8. Para teman-teman karib penulis: Rahmat Riyadi yang sangat-sangat sering membantu penulis dan rekan-rekan lainnya dalam banyak hal. Nur Afni Zugito dan Farah Zhahira Whalyani, mba-mba yang baik dan tulus. Semoga Allah memberkati jalan hidup kalian.

9. Teman-teman baik penulis: Fadhil Pramadiansyah, Istiqomah Febrian, Hardian Novianto, Ayyub Alfaraz, Sri Resky Mulyadi, Raisha Nadina, Andi Rizky Amaliah Nurfalalah, Nurfalalah Anbar dan Dewi Sukma yang sudah menemani keahahihian perkuliahan ini. Juga kepada Raihan Darwis yang banyak bercerita dengan dan membantu penulis di akhir studi.



10. Rekan-rekan seangkatan penulis: Naswan Nasrun, Alan Galan Savanna, Faiq Q, Alif Ihza, Dinda Salsabila, Nur Adnan, Nasya Quilim, Robby Adi, Yudi Fauzan Jati, Ahmad Salim, I Putu Adhiyasa, Sebprina Eka, Annisa Apriliani, Zhadela Arisafael, Oktaviano Nandito, Lutfania Andriani, Faqih Yusuf, Rani Palilu, Yustil Anshari, Nurnaningsih Al Hasmi, Putri Alifiah, Febrian Mahardika, Muh Farhan, Randika, Brenda Presyillia, Nurul Pratiwi, Defky Sharma, Nabil Rizkia, Nahda Nurfadillah dan teman-teman Reforma 2018 yang lain. You *ROCK, GUYS!*

11. Para senior mahasiswa ilmu hubungan internasional UNHAS: Fadil Aidil, Yusuf Islam, Cici Rindini, Rifqi Zulfahmi, Ardela, Faturrahman, Dian Maulina, Nurul Titania, Fiqri, Andi Wira Eka, Rizky Hikmatullah, Ikрана Ramadhani, Timothy, Zulmi, Yuda Sanjaya, Reza Vikariansyah, Alif Anshari, Agung Abdillah, Agung Alfarizi, Agung Prawoto, Yusril Partang dan lain-lain. Adik-adik junior mahasiswa ilmu hubungan internasional UNHAS: Alif, Ryo, Fey, Nadin, Reza, Owen dan yang lain.

12. Teman-teman KKN 106 Rappocini 5: Gasyah Laksita, Atiqah Zakaria, Mahira Mawaddah, Nabilah Maimanah, Gibran Rahmatul, Rifky Parahian, Andi Anniza Padjonga, Nurul Izza, Fajar Siddiq dan yang tidak dapat penulis muat satu persatu. Posko yang asik walau penulis sempat covid.

13. Bapak Xi Jinping, Bapak Joe Biden, Bapak Scott Morisson, Bapak Emmanuel Macron, Anthony Albanese, Rostchild Family, Rockefeller Family dan para elit global yang berhasil menghadirkan fenomena HI yang penulis kaji dan teliti ini. Tanpa kalian *literally* skripsi ini tidak akan ada.

14. Kepada seluruh pihak yang terlewat dari *appreciation section* ini karena keterbatasan ruang dan waktu.

15. Ditaruh di angka terakhir biar ga dikira *narcissistic* kepada diri sendiri yang sudah memperjuangkan banyak hal dalam hidup. Untuk diriku di masa depan, apa yang hari ini sedang kutulis adalah bagian dari sejarah besar hidupmu. Banggalah dengan dirimu di masa lampau sebagaimana banggaku padamu di masa depan. Selalu ingat buhul janjimu. Engkau telah dipilih maka pililah segala yang benar.



## ABSTRAKSI

**M. Daffa Al Haq Raynanda Putra. 2018. E061181342. “Kemitraan Pertahanan Australia-Amerika Serikat dalam Upaya Mewujudkan Keamanan Regional di Indo-Pasifik (Studi Kasus AUKUS)”. Pembimbing I: Agussalim S. IP, MIRAP. Pembimbing II: Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR.. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Australia-Amerika Serikat menjalin berbagai kemitraan pertahanan khususnya AUKUS untuk membendung pengaruh Republik Rakyat Tiongkok yang terus berkembang demi terwujudnya keamanan regional di Indo-Pasifik. Metode penelitian memakai metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif eksplanatif dipilih agar mampu memberikan penjelasan mengapa sesuatu bisa terjadi, dalam skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana bisa kemitraan AUKUS terjalin. Temuan dari penelitian ini yang didasarkan dari *regional security complex theory* dan konsep *offshore balancing* menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas keamanan regional antara Australia dengan Republik Rakyat Tiongkok yang membuat Australia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Tiongkok khususnya di kawasan Indo-Pasifik meskipun sirkulasi ekonomi kedua negara sangat besar. Hal ini adalah hasil dari bentukan identitas, sejarah panjang, pandangan politik dan kesamaan nilai antara Australia & Amerika Serikat.

**Kata Kunci: Indo-Pasifik, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Kemitraan Pertahanan, AUKUS**

## ABSTRACT

**M. Daffa Al Haq Raynanda Putra. 2018. E061181342. " Kemitraan Pertahanan Australia-Amerika Serikat dalam Upaya Mewujudkan Keamanan Regional di Indo-Pasifik (Studi Kasus AUKUS)". 1<sup>st</sup> Advisor: Agussalim S. IP, MIRAP. 2<sup>nd</sup> Advisor: Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR. Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.**

This research explains how Australia-United States of America established various defense partnerships, especially AUKUS to stem the growing influence of the People's Republic of China for the sake of realizing regional security in the Indo-Pacific. The research method uses explanatory qualitative methods. Explanative qualitative research was chosen in order to be able to provide an explanation of why something can happen, in this thesis to explain how the AUKUS partnership can be established. The results of this study, which are based on regional security complex theory and the concept of offshore balancing, demonstrate that there is regional security complexity between Australia and the People's Republic of China, which makes Australia to cooperate with the United States of America to restrain China's influence, particularly in the Indo-Pacific region, even though the economic circulation between two countries very large. This is the outcome of Australia and the United States' similar identity, political beliefs, lengthy history and shared values.

**Keywords: Indo-Pacific, People's Republic of China, Australia, United States, Defense Partnership, AUKUS**

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI .....	xi
ABSTRACT .....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Bagan .....	xvi
Daftar Diagram.....	xvii
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Singkatan.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	13
1.4 Kerangka Konseptual .....	14
1.4.1 Konsep <i>Regional Security Complex</i> .....	15
1.4.2 Konsep <i>Offshore Balancing</i> .....	22
1.5 Metode Penelitian.....	25
1.5.1 Jenis Penelitian.....	25
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.5.3 Teknik Analisis Data.....	27
1.5.4 Tahapan Penelitian .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Perangaruh Kompleksitas Keamanan Regional Terhadap Stabilitas Suatu Kawasan .....	28
B. <i>Offshore Balancing</i> sebagai <i>Grand Strategy</i> Amerika Serikat .....	35
C. Upaya Mewujudkan Keamanan Strategis Di Indo-Pasifik .....	40
BAB III GAMBARAN UMUM .....	51

A.	Kondisi dan Kerja Sama yang Terbangun di Kawasan Indo-Pasifik.....	51
B.	Kemitraan Pertahanan yang Terjalin antara Australia-Amerika Serikat ..	66
BAB IV	PEMBAHASAN.....	83
A.	Bentuk Kemitraan AUKUS di tengah Kompleksitas Regional Antara Australia dengan Republik Rakyat Tiongkok.....	83
B.	Strategi Offshore Balancing Amerika Serikat dalam Upaya Membendung Pengaruh Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik .....	112
BAB V	PENUTUP.....	121
A.	<b>Kesimpulan</b> .....	121
B.	<b>Saran</b> .....	122
DAFTAR	PUSTAKA .....	124

## **Daftar Tabel**

Tabel 1. Perbandingan Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik .....	55
Tabel 2. 10 besar mitra ekspor Australia tahun 2019-2020 .....	94
Tabel 3. 10 besar mitra impor Australia tahun 2019-2020 .....	94
Tabel 4. 10 besar mitra dagang dua arah Australia tahun 2019-2020.....	95



## Daftar Bagan

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	14
-----------------------------------	----

## **Daftar Diagram**

Diagram 1. Nilai Ekspor Australia ke Tiongkok Periode 2012-2021 .....	93
Diagram 2. Nilai Impor Australia dari Tiongkok periode 2012-2021 .....	94

## **Daftar Gambar**

Gambar 1. Diagram membedakan Asia-Pasifik dengan Indo-Pasifik .....	3
---	---

## Daftar Singkatan

AUKUS	:	<i>Australia, United Kingdom, United States</i>
RSCT	:	<i>Regional Security Complex Theory</i>
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
RRT	:	<i>Republik Rakyat Tiongkok</i>
AS	:	<i>Amerika Serikat</i>
ANZUS	:	<i>Australia, New Zealand, United States</i>
NATO	:	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
USCENTCOM	:	<i>United States Central Command</i>
EUCOM	:	<i>United States European Command</i>
USINDOPACOM	:	<i>United States Indo-Pacific Command</i>
USPACOM	:	<i>United States Pacific Command</i>
IA-CEPA	:	<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IPEF	:	<i>Indo-Pacific Economic Framework</i>
RCEP	:	<i>Regional Cooperation Economic Partnership</i>
RIMPAC	:	<i>Rim of the Pacific</i>
NSA	:	<i>National Security Agency</i>
CSEC	:	<i>Communications Security Establishment Canada</i>
GCHQ	:	<i>Government Communications Headquarters</i>
ASD	:	<i>Australian Signals Directorate</i>
GCSB	:	<i>Government Communications Security Bureau</i>

QSD	:	<i>Quadrilateral Security Dialogue</i>
UKUSA	:	<i>United Kingdom-United States Communication Intelligence Act</i>
AUSMIN	:	<i>The Australia–US Ministerial Consultations</i>
ENNPIA	:	<i>Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement</i>
NPT	:	<i>Nuclear Non-Proliferation Treaty</i>
AQuA	:	<i>AUKUS Quantum Arrangement</i>
AURAS	:	<i>AUKUS Undersea Robotics Autonomous Systems</i>
ChAFTA	:	<i>The China-Australia Free Trade Agreement</i>
AIIB	:	<i>Asia Infrastructure and Investment Bank</i>
WTO	:	<i>World Trade Organization</i>
PDB	:	Produk Domestik Bruto

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keamanan internasional menempati posisi fundamental dalam studi ilmu hubungan internasional. Bagaimana tidak, setiap interaksi antar-negara akan selalu berpatokan pada situasi keamanan internasional yang ada. Bahkan, semua usaha-usaha yang dilakukan aktor ilmu hubungan internasional berasal dan bermuara pada keamanan dalam tingkat internasional.

Keamanan internasional yang dalam istilah lain dikatakan sebagai keamanan global merupakan frasa yang berpatokan terhadap tindakan atau aksi yang dilakukan oleh negara dan organisasi internasional untuk mengusahakan kepastian hidup serta keselamatan bersama. Langkah-langkah dan usaha tersebut meliputi perjanjian diplomatik hingga aksi militer berupa perjanjian atau konvensi. Keamanan nasional dan internasional akan selalu terkait (Buzan, 2009). Ketika keamanan nasional tergerus, kawasan atau regional sekitar negara tersebut akan terdampak pada ketidakstabilan. Hal ini merupakan konskuensi dari masyarakat global yang terkoneksi satu sama lain. Ketika suatu kawasan berada dalam ketidakstabilan maka keamanan dalam skala globalpun akan tergerus.

Salah satu kawasan yang menjadi sorotan dalam studi ilmu hubungan internasional setidaknya dalam lima belas tahun terakhir ialah kawasan Indo-Pasifik. Berawal dari sebuah artikel ilmiah yang dirilis oleh perwira angkatan laut India; Gurpreet S. Khurana yang mengkaji bagaimana meningkatnya saling ketergantungan

ekonomi antar negara dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan arus perdagangan yang kuat, terutama di kawasan Indo-Pasifik (Khurana, 2007).

Beberapa bulan artikel Gurpreet Khurana rilis, Perdana Menteri Jepang kala itu; Shinzo Abe berpidato di depan parlemen India (kedua negara: Jepang & India kemudian dikenal sebagai negara yang banyak mengambil peran dalam berbagai inisiasi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik) berjudul “*Confluence of the Two Seas*”, yang berbicara tentang penggabungan dinamis dari Pasifik barat dan samudera Hindia sebagai lautan kebebasan dan kemakmuran (Butcher, 2022). Hal inilah yang membuat terminologi Indo-Pasifik mulai umum dikenal masyarakat dan kaum akademisi pada khususnya.

Secara definisi sendiri, Indo-Pasifik merupakan sebuah wilayah imajiner yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Asia-Pasifik (Heiduk & Wacker, 2020). Negara-negara yang berada di kawasan ini lebih berfokus dan tertarik terhadap konsep imajiner ini setelah adanya pergeseran geopolitik serta geostrategis dari kawasan Asia-Pasifik (Chen, 2018).

Dialog Keamanan Segiempat Strategis atau Quad yang diinisiasi Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia menjadi titik balik betapa masifnya penggunaan istilah bagi kawasan ini. Baik Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia masing-masing telah menawarkan pandangan mereka sendiri tentang Indo-Pasifik. ASEAN, selaku kawasan yang berada tepat di tengah Indo-Pasifik dan terlebih dahulu eksis sebagai sebuah organisasi regional juga telah mengembangkan narasinya dalam melihat Indo-Pasifik yang terangkai dalam “Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik” (Koga, Oba, Jimbo, & Cooper, 2019).

Gambar 1. 1Diagram membedakan Asia-Pasifik dengan Indo-Pasifik



Hasil survei ISEAS-Yusof Ishak Institute memperlihatkan bagaimana penerimaan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik di mata orang ASEAN. 40,3% orang Asia Tenggara merasa bahwa ASEAN perlu mengartikulasikan kembali Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik lebih jelas agar bisa tetap relevan. 20,2% berpendapat bahwa strategi Indo-Pasifik adalah hanya alat bagi berbagai negara untuk membentuk geopolitik baru. 16,7% berpendapat bahwa strategi tentang kawasan Indo-Pasifik ini tidak boleh ditentukan oleh satu negara, juga tidak boleh digunakan untuk mengakomodasi kepentingan spesifik negara tertentu. Setidaknya dari survei di tahun 2021 ini lebih baik ketimbang 2020 yang memperlihatkan bahwa 54% bahkan berpendapat bahwa konsep Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik itu tidak jelas (Seah, 2021). Terlihat bahwa konsep Indo-Pasifik ini diinginkan oleh masyarakat ASEAN untuk mengartikulasikan pandangannya sendiri daripada menggunakan artikulasi oleh eksternal.



Berbagai sisi pandang di atas sebenarnya dapat ditemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam cakupan geografis Indo-Pasifik tergantung masing-masing aktor yang mendefinisikan wilayah ini. Jepang, Australia, dan India mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai mencakup seluruh Samudra Hindia dari pantai timur Afrika melintasi Samudra Pasifik hingga Amerika. ASEAN tidak menganggapnya sebagai ruang teritorial yang berdekatan tetapi sebagai kawasan yang terintegrasi dan saling berhubungan erat (Yansim, 2020).

Amerika Serikat menggambarkan kawasan Indo-Pasifik mulai dari pantai barat India hingga pantai barat Amerika Serikat, selaras dengan wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik. Pendefinisian dari Amerika Serikat ini kemudian yang dianggap penulis paling relevan sebagai referensi utama dalam tulisan ini.

Begitu besarnya wilayah kawasan Indo-Pasifik membuat keamanan internasional di kawasan imajiner Indo-Pasifik sendiri menjadi diskursus yang sangat menarik dan menjadi perhatian khusus terlebih semenjak kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok di bidang kekuatan material; ekonomi dan militer yang secara pasti mampu mengikis pengaruh Amerika Serikat di berbagai penjuru dunia khususnya di Indo-Pasifik entah itu secara aliansi, politik hingga ekonomi (Das, 2019).

Menarik kemudian membedah kawasan imajiner Indo-Pasifik ini berdasarkan imajinasi strategis dari para pemangku kepentingan di dalamnya sebagaimana metode untuk menafsirkan kartografi melalui imajinasi ruang peta mental. Dalam geografi perilaku, peta mental adalah persepsi sudut pandang subjek tentang area interaksi mereka. Ruang imajinatif semacam ini mungkin tidak seperti di peta geografis umum, layaknya wilayah Af-Pak, juga tidak selalu cocok dengan dimensi politik yang ada,

misalnya wilayah Asia-Pasifik (pemetaan dari wilayah ini tidak mutlak, tergantung penafsiran masing-masing subjek).<sup>1</sup> Dimulai dari Republik Rakyat Tiongkok yang kemudian dapat dikatakan sebagai pemeran utama dalam kawasan ini.

Pergeseran geopolitik dan geostrategis yang disinggung di beberapa paragraf sebelumnya tidak terlepas dari dampak kemajuan maritim negara tirai bambu yang telah menyebar di dua samudra dalam upaya untuk mengamankan kebutuhan energi dan meningkatkan hubungan perdagangannya. Kebangkitan Tiongkok telah menjamah dalam berbagai bentuk dan rupa, dimulai dari pengaruh ekonomi yang meningkat hingga ke pengaruh militer yang meningkat. Peningkatan ekonomi dan postur militer inilah yang menjadi penentu pergeseran kekuasaan di Indo-Pasifik. Kebangkitan Tiongkok ini sejalan dengan perilaku agresif mereka di sentra dari kawasan Indo-Pasifik yakni Laut Tiongkok Selatan.

Di Laut Tiongkok Selatan atau *South China Sea*, klaim sembilan garis putus-putus atau *The Nine Dash Line* (sebelumnya sebelas garis putus-putus) diusahakan begitu keras oleh Republik Rakyat Tiongkok (Beech, 2016). Garis imajiner diklaim Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan mereka berdasar latar historis. Isu Laut Tiongkok Selatan menjadi perhatian khusus bagi pemangku kepentingan di kawasan dengan sikap asertif dan pengerahan militer RRT di kawasan tersebut termasuk di wilayah yang meliputi teritorial negara lain (Sinaga, 2015). Tidak mengherankan

---

<sup>1</sup> AfPak (atau Af-Pak) merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh lingkaran kebijakan luar negeri AS untuk menunjuk Afghanistan dan Pakistan sebagai teater operasi tunggal. Istilah ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang dipopulerkan oleh pemerintahan Obama, yang menganggap wilayah Afghanistan dan Pakistan memiliki situasi politik dan militer tunggal yang dominan yang memerlukan kebijakan bersama dalam Perang Melawan Teror. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 2008.

karena kawasan yang secara statuta tidak bertuan satu ini memiliki potensi luar biasa. Di tahun 2016, diperkirakan 3,4 Triliun dolar perdagangan melewati Laut Tiongkok Selatan (ChinaPower Team, 2017). Menurut temuan U.S Geological Survey diestimasikan ada sekitar sekitar 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam dan 11 miliar barel minyak bumi yang siap eksplorasi di Laut Tiongkok Selatan (Asia Maritime Transparency Initiative, 2018).

Jika RRT memiliki kontrol yang sah atas wilayah ini, maka mereka akan dapat mengambil manfaat dari kegiatan ekonomi yang berlangsung. RRT mampu mengalokasikan keuntungannya untuk membantu populasi besar mereka dengan menyediakan lebih banyak program sosial dan manfaat lain yang membutuhkan lebih banyak dana (Rutzick & Chen, 2021). Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam tentu ingin mencegah hal ini dan mengklaim bagiannya masing-masing. Termasuk Amerika Serikat yang juga tetap ingin memiliki “haknya” di wilayah ini walaupun secara geografis terletak sangat jauh. Kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan terbagi dalam tiga kategori besar termasuk:

- (1) Kepentingan ekonomi (jalur laut);
- (2) Hubungan pertahanan dengan sekutu dan mitra keamanan lainnya;
- (3) Implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan dan pengaruh global (Ott, 2019).

Perkembangan Republik Rakyat Tiongkok juga meliputi hal konektivitas dan infrastruktur, *Belt and Road Initiative* mengedepankan rencana yang dipimpin Tiongkok untuk mengikat ruang geopolitik. Geopolitik dan geoekonomi dari *Belt and Road Initiative* memiliki potensi untuk mendesain ulang dimensi spasial dan tata

kelola teritorial secara efektif mengimbangi hegemoni dominan Amerika Serikat dan sekutunya (Ahmed & Lambert, 2021).

Amerika Serikat yang sebenarnya masih memiliki pengaruh secara jaringan keamanan di kawasan ini dengan sekutunya disertai armada militer yang memadai, beberapa strateginya justru membawa angin segar bagi Tiongkok & merugikan sekutunya sendiri dalam beberapa kasus.<sup>2</sup> Hal itu berdampak di beberapa bagian Indo-Pasifik, khususnya di Asia Tenggara, kekuatan dan pengaruh Tiongkok tumbuh menyamai, dan dalam beberapa kasus melebihi, Amerika Serikat.

Telah ada penyesuaian kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat dengan transformasi nama yang signifikan dari Komando Pasifik AS menjadi komando Indo-Pasifik (Command, 2018). Akan tetapi, penarikan diri Amerika Serikat dari Kemitraan Trans-Pasifik dan beberapa seruan untuk terus menerus meminta pembagian beban yang adil bagi beberapa sekutunya telah membuat mereka seakan pergi meninggalkan aliansi dalam kerancauan (Mui, 2017).

Konflik Amerika Serikat dengan Tiongkok di jantung Indo-Pasifik juga telah menimbulkan “imajinasi” yang diperebutkan dari aktor pesisir lainnya. Australia, yang merupakan salah satu negara pertama yang membahas gagasan Indo-Pasifik dengan serius melalui buku putih pertahanannya, secara implisit telah memperdebatkan keseimbangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

---

<sup>2</sup> *Rebalancing Strategies* berupa *Pivot to Asia* merupakan bentuk kesadaran Amerika Serikat selama beberapa tahun terlalu terfokus pada Timur Tengah & “melupakan” Asia/Indo-Pasifik

Buku putih Kebijakan Luar Negeri Australia yang rilis tahun 2017 menunjukkan bahwa adanya keberpihakan kepada beberapa pihak di Indo-Pasifik yakni Jepang, Indonesia, India, dan Republik Korea adalah yang menjadi urutan pertama bagi Australia, baik sebagai mitra bilateral utama dalam hak mereka sendiri maupun sebagai negara yang akan mempengaruhi bentuk tatanan regional. Australia memang terlihat sedang mengupayakan kerja sama ekonomi dan keamanan serta hubungan antar-warga untuk memperkuat hubungan ini. Australia juga berpedoman untuk bekerja dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dari keempat Negara tersebut (Australian Government, 2017).

Meskipun Australia secara publik berkomitmen untuk bekerja sama dengan keempat negara tersebut, rentetan kebijakan yang diambil oleh Australia untuk kawasan imajiner Indo-Pasifik ini terlihat bahwa terdapat benang merah keterkaitan pemerintahan Australia terhadap pemerintahan Amerika Serikat yang dijadikan sebagai sentra dalam pengambilan kebijakan setrategis. Kemitraan yang terbangun antara Australia dengan Amerika Serikat sebenarnya telah terjalin dalam kurun waktu yang begitu lama dan berjalan dengan pasti. Bahkan, kemerdekaan yang diraih oleh Australia hari ini merupakan bagian dari peran besar Amerika Serikat. Kerja sama yang terbangun tersusun rapi mulai dari politik, ekonomi, pertahanan bahkan olahraga.

Kemitraan yang terjalin keduanya dapat digolongkan sebagai “aliansi murni”. Tidak berlebihan istilah itu disandingkan pada hubungan kedua negara mengingat bahkan sebelum Australia berbentuk sebagai negara independen di tahun 1942 sudah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Orang Australia dan Amerika Serikat pertama

kali bertempur bersama di bawah komando terpadu pada Pertempuran Hamel Prancis pada Juli 1918 di bawah Jenderal Australia John Monash. Salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Australia ialah Amerika Serikat pada tahun 1940. Pasca Perang Dunia II akhirnya aliansi antara Australia dan Amerika Serikat diformalkan melalui Perjanjian ANZUS pada tahun 1951. Lebih dari 70 tahun kemudian, perjanjian tersebut tetap menjadi dasar hubungan keamanan antara Australia dengan Amerika Serikat.

Salah satu peran perjanjian ini bagi hubungan aliansi manakala klausul pertahanan timbal balik dari perjanjian ANZUS diajukan oleh Australia untuk pertama kalinya pada tahun 2001, setelah serangan teroris di New York dan Washington (Australia in the USA). Kemitraan dalam bidang pertahanan dan keamanan keduanya tetap berlanjut dan menjadi sekutu dan mitra koalisi yang kuat dalam koalisi global seperti dalam upaya global untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan.

Aliansi ini meningkatkan kemampuan Australia untuk melindungi dirinya sendiri dan kepentingannya dengan menyediakan akses ke perangkat keras dan teknologi pertahanan terkemuka dunia, pelatihan dan latihan gabungan, serta kemampuan intelijen yang vital. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama membantu membentuk norma-norma internasional guna memajukan kepentingan bersama yang vital di ranah laut, ruang udara dan luar angkasa, serta keamanan siber.

Secara *resume* Australia telah berperang bersama Amerika Serikat sebagai sekutu dalam setiap aksi militer besar Amerika Serikat dalam satu abad terakhir, termasuk Perang Dunia I, Perang Dunia II, Korea, Vietnam, Teluk Persia, Somalia, Timor

Timur, Afghanistan, dan Irak. Relasi kemitraan politik pertahanan keduanya pun tidak terindahkan di kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan imajiner yang mempunyai potensi yang begitu besar.

Kemitraan politik pertahanan yang terbangun antara Australia dengan Amerika Serikat yang dikhususkan untuk memaksimalkan potensi di Indo-Pasifik diberi nama AUKUS: *Australia, United Kingdom & United States*. Untuk kemitraan pertahanan kali ini baik Australia & Amerika Serikat mengajak Britania Raya untuk turut serta. Kemitraan pertahanan ini cukup membuat dunia internasional memanas, tidak hanya dari sisi RRT dengan sekutunya tapi juga sekutu Australia, Prancis. AUKUS membuat Australia mengakhiri kesepakatan sebesar \$65 miliar dengan Prancis untuk mengakses teknologi kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan Britania Raya (BBC, 2021). Prancis bahkan menggambarkan pembatalan kesepakatan sepihak oleh Australia layaknya ditusuk dari belakang (Darmanin & Seftalovich, 2021). Hal ini mengindikasikan betapa luar biasanya hubungan Australia dengan Britania Raya dan Amerika Serikat ini.

Terinisiannya AUKUS menjadi batu loncatan bagi kembali mesranya hubungan antara Australia dan Amerika Serikat. Peningkatan postur pertahanan antara Australia dengan Amerika Serikat tentu berdampak signifikan pada hubungan mereka. Pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat tidak seperti Tiongkok yang secara ekonomi. Kemesraan Amerika Serikat dan Australia secara militer memiliki tujuan untuk membendung ancaman Australia di Indo-Pasifik dalam hal ini eskalasi dominasi Tiongkok di kawasan, yang uniknya selama 15 tahun terakhir Tiongkok menjadi mitra utama perdagangan Australia (Taylor, 2021).

Secara kualitatif, AUKUS bersifat lebih berkelanjutan. Kesepakatan yang terjalin tidak hanya di bidang maritim dengan kapal selam tersebut. Tetapi lebih ambisius, kesepakatan tersebut juga mencakup pengembangan kecerdasan buatan, komputasi kuantum dan teknologi siber. AUKUS berusaha untuk memenangkan persaingan teknologi dengan Tiongkok melalui penyatuan sumber daya dan mengintegrasikan rantai pasokan untuk ilmu pengetahuan dan industri yang bermuara pada pertahanan. Ini akan menjadi tujuan AUKUS selama beberapa dekade ke depan melalui berbagai proyek transnasional untuk meraih keunggulan di berbagai bidang (Tarapore, 2021).

Laporan Australian Strategic Policy Institute bahkan menyebut proyek ini sebagai “usaha paling kompleks yang telah dimulai dan pernah dilakukan Australia” (Nicholls, Dowie, & Hellyer, 2021). Berbagai rangkaian dinamis dari Australia dan Amerika Serikat menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti melalui perspektif ilmu hubungan internasional. Penelitian ini akan mengulas alasan dibalik mesranya hubungan kerja sama antara Australia dengan Amerika Serikat yang terjalin selama bertahun-tahun lamanya, dengan terbentuknya AUKUS.



## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan berfokus pada analisis dari kemitraan politik pertahanan Australia dengan Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan alasan terinisiannya AUKUS. Batasan sampel penelitian (khusus untuk) AUKUS dibatasi sampai dengan Juni 2022, saat Anthony Albanese berjanji membayar ganti rugi ke Prancis. Batasan pengambilan data untuk AUKUS ini dilakukan agar kerja sama AUKUS bersifat dinamis dan akan terdapat perubahan bila tidak dibatasi. Apalagi, AUKUS sendiri yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah seluruh rangkaian AUKUS tidak hanya salah satu bagian seperti AQuA atau AURAS. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan batasan masalah tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kemitraan pertahanan Australia-Amerika Serikat?
2. Bagaimana peluang dan tantangan kemitraan pertahanan Australia-Amerika Serikat (dengan terbentuknya AUKUS)?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

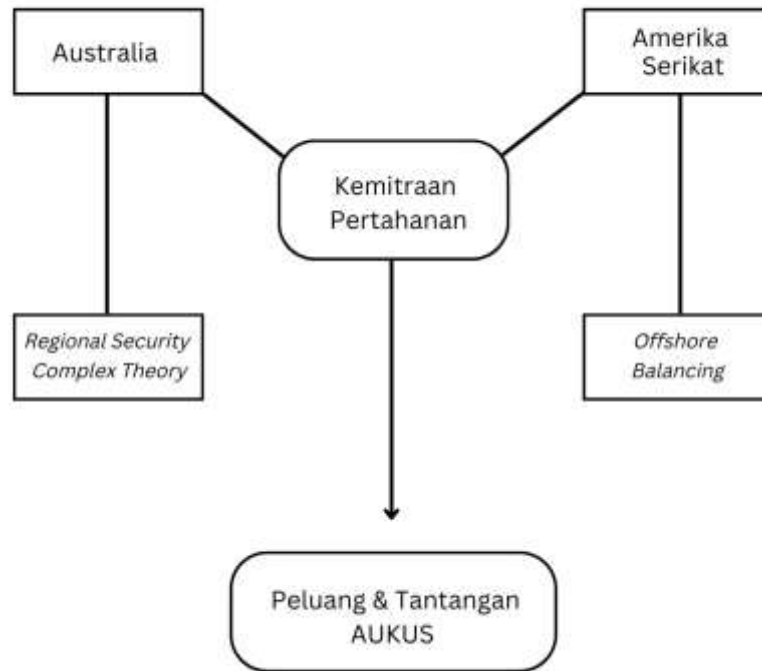
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kemitraan Australia-Amerika Serikat.
2. Untuk memproyeksikan peluang dan tantangan kemitraan pertahanan Australia-Amerika Serikat (dengan terbentuknya AUKUS).

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bentuk kontribusi dalam studi ilmu hubungan internasional kontemporer, khususnya pada studi keamanan dan strategis, serta kajian negara Australia dan Amerika serta kawasan di Indo-Pasifik pada umumnya.
2. Salah satu referensi bagi *stakeholder* dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan terkait dengan keamanan strategis negara Australia dan Amerika serta kawasan di Indo-Pasifik pada umumnya..
3. Salah satu referensi bagi akademisi dan masyarakat secara luas untuk memperluas wawasan tentang studi stregis dari negara Australia dan Amerika Serikat serta kawasan di Indo-Pasifik pada umumnya.

## 1.4 Kerangka Konseptual

*Bagan 1. Kerangka Konseptual*



Sesuai dengan bagan di atas, penelitian ini akan menggunakan konsep *Regional Security Complex* dan *Offshore Balancing*. Dalam hal ini, *regional security complex theory* akan digunakan untuk membedah mengapa terdapat adanya keterikatan Australia kepada Amerika Serikat selama bertahun-tahun lamanya terkhusus kaitannya dengan politik pertahanan di kawasan Indo-Pasifik (sudut pandang Australia). Teori *Offshore Balancing* akan dipakai dalam membedah strategi penyesuaian Amerika Serikat untuk mengembalikan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dengan terbentuknya kemitraan pertahanan (sudut pandang Amerika Serikat).

### **1.4.1 Konsep *Regional Security Complex***

Melalui buku “*Region and Powers: The Structure of International Security*” yang terbit di tahun 2003, Barry Buzan dan Ole Wæver mempopulerkan konsep yang diberi nama *regional security complex*. Sebuah konsep yang pertama kali Buzan sketsakan melalui *People, States & Fear* di tahun 1983 (Buzan, 2003). *Regional security complex theory* yang kemudian disingkat menjadi RSCT merupakan sebuah teori yang menitikberatkan atensinya pada signifikansi elemen regional atau kawasan. RSCT ini mengedepankan pendekatan dari sisi keamanan (khususnya tradisional). Konsep ini digunakan untuk menganalisis interaksi di antar-negara yang berfungsi sebagai unit dan saling terhubung satu sama lain di suatu kawasan sebagai sistemnya. Pentingnya kawasan dalam sistem internasional bahkan terkadang dianggap sebagai sub-sistem supranasional dari sebuah sistem internasional itu sendiri (Burton, 1969). Pengertian kawasan dalam persepektif RSCT terminologinya sedikit berbeda dari deifnisi umum.

Konsep kawasan di sini sejatinya tidak hanya mengarah pada pengertian sebatas teritori dan jarak geografis, namun mengacu pada konteks yang lebih luas. Kawasan di sini juga menghimpun gabungan elemen-elemen lain yang berperan dalam pembentukan identitas unit sebagai bagian dari sebuah “kawasan” (Alvarta, 2018). Elemen yang membentuk identitas kawasan ini meliputi kultur, bahasa, ekonomi sampai hubungan politik, makanya di beberapa kasus terdapat kawasan yang dibentuk/dikelompokkan dari dua kawasan, negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki kesamaan kultur dimasukkan ke dalam satu kawasan yang sama (Breslin,

2010). Unsur-unsur ini memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya secara bersamaan, yang saling terkoneksi, membuat masalah keamanan negara-negara di suatu kawasan tidak dapat dianalisis secara terpisah.

RSCT merupakan teori yang berasal dari perpaduan pendekatan salah dua teori utama dalam ilmu hubungan internasional: realisme (neo-realis) & konstruktivisme untuk membedah kompleksitas keamanan dari sebuah kawasan. Pendekatan realisme dipakai untuk membedah fungsi faktor geografis dan distribusi kekuasaan dalam kawasan yang dimaksud. Distribusi dalam polaritas ini terbagi menjadi *superpower*, *great power*, *regional power* dan *lesser power*. Amerika Serikat seringkali digolongkan sebagai *superpower*. Di belakangnya, terdapat entitas *great power* seperti Tiongkok (yang saat ini mulai bertransformasi menjadi *super*), Rusia, Uni Eropa hingga Jepang. Polaritas nyatanya dapat dibedah tidak hanya pada tataran global namun bisa diterjemahkan pada tataran kawasan hingga sub-kawasan. Barry Buzan berpandangan bahwa polaritas atau distribusi kekuasaan ini muncul didasari oleh fenomena pada setiap kawasan terdapat negara yang memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan negara yang lain namun tetap tidak melampaui kawasan itu sendiri. Contohnya saja Brazil, Indonesia dan India (Sultan, 2017).

Kalevi Jaakko Holsti menggambarkan peranan suatu negara yang berpredikat *regional power* terbagi menjadi tiga:

1. *Aggressor*: Jika negara tersebut memilih menjadi aktor dominan dalam kawasan dengan senantiasa mengupayakan peningkatan *power* sembari mengesampingkan distribusi *power* yang merata di kawasan

2. *Defender*: Jika negara tersebut berusaha mempertahankan *status quo*, interaksi berupa konflik maupun kooperasi
3. *Balancer*: Jika negara tersebut mengupayakan keseimbangan *power* dengan *regional power* lain dalam upaya mewujudkan stabilitas kawasan (Frazier, 2010)

Untuk pendekatan konstruktivis, digunakan untuk membedah identitas dari negara-negara di suatu kawasan. Identitas di sini merupakan representasi dari pemahaman aktor tentang siapa mereka, yang pada gilirannya menunjukkan minat dan kepentingan mereka. Pentingnya identitas menurut Burke, tidak ada politik dunia tanpa identitas, tanpa masyarakat, tanpa negara, tanpa sistem internasional (Burke, 2006). David Campbell bahkan berpandangan bahwa identitas adalah dimensi keberadaan yang tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa tanpanya (Campbell, 1992). Dunia tanpa identitas dalam hemat Ted Hopf akan menjadi dunia yang kacau penuh akan ketidakpastian yang meresap dan tidak dapat diperbaiki, dunia yang jauh lebih berbahaya daripada anarki (Hopf, 1998).

Alexander Wendt mengklasifikasi identitas menjadi empat yakni orang atau personal atau korporasi, jenis, peran dan kolektif (Mengshu, 2020). Identitas personal adalah identitas aktor terbentuk secara natural, atribut negara dan ras menjadi contoh terdepan. Kedua, identitas jenis. Ini didorong oleh faktor tertentu seperti ideologi politik atau agama. Identitas peran menjadi yang ketiga dimana menitikberatkan posisi atau kedudukan aktor dalam hubungan internasional. Identitas ini terbentuk dari aksi-reaksi dalam interaksi hubungan internasional (Holsti, 1970).

Keempat, identitas kolektif. Identitas ini tercipta manakala suatu kelompok atau aliansi yang di dalamnya terdapat aktor negara yang saling terkoneksi hingga akhirnya membentuk identitas bersama (Margareth, 2017). Hubungan antar negara di dalamnya pun terjalin erat karena kebersamaan yang tinggi. Contoh paling nyata dari identitas kolektif ini seperti identitas yang terbangun antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok.

Sejalan dengan hal tersebut, perspektif RSCT Buzan melihat negara sebagai entitas yang terdiri dari 3 blok bangunan fundamental yakni wilayah dan kependudukan (basis fisiknya), kelembagaannya (birokrat & hukum) serta ide-idenya (ideologi negara hingga sosial budaya) (Buzan, 1991). Aksi yang dilakukan suatu negara sejalan dengan blok fundamental khususnya identitas yang melekat pada diri atau dipilihnya. Dengan demikian, suatu negara tidak dapat bertindak bertentangan dengan identitasnya karena hal ini akan mempertanyakan keabsolutan identitas, juga preferensinya. Melalui identitas, dapat menjelaskan mengapa Jerman, meskipun menjadi kekuatan besar dengan ekonomi global terkemuka, tidak mampu bertransformasi menjadi hegemon atau setidaknya berpengaruh secara militer dewasa ini. Hal tersebut tidak terlepas dari identitas kekejaman rezim Nazi Adolf Hitler selama Perang Dunia Kedua, identitas politik Jerman bergeser dari salah satu militerisme ke pasifisme karena keadaan sejarah yang terbentuk. Peran identitas dalam politik luar negeri negara termasuk ketika negara-negara blok barat bergabung dalam pakta pertahanan atlantik utara (NATO) karena kesamaan referensi ideologis.

Bagi para konstruktivis, identitas merupakan pusat pemahaman tentang politik internasional (Berenskoetter, 2010). Pemahaman identitas ini akan mengarahkan bagaimana peran identitas memengaruhi kebijakan dan arah politik suatu negara baik dari internal maupun eksternal serta kebijakan bersama dalam bentuk kawasan. Lebih dalam identitas RSCT di sini berusaha untuk mengenali dan klasifikasi pola yang terbagi dua yakni *amity* dan *enmity*. *Enmity* merupakan relasi yang dibentuk maupun terbentuk oleh negara-negara di dalam satu kawasan atas dasar rasa curiga dan ketakutan, *enmity* ini sangat berkaitan erat dengan dilemma keamanan. Sementara *amity* (persahabatan) ialah relasi yang menata hubungan persahabatan di antara negara-negara bertransformasi menjadi sebuah hubungan yang lebih baik. Hubungan *amity* ini seringkali diharapkan menuju pada perlindungan dan dukungan dalam hal keamanan yang bersifat kolektif. Kedua pola ini membentuk kompleksitas keamanan di kawasan. Untuk menentukan pola *amity* dan *enmity*, terdapat empat unsur vital yang mengenali kompleksitas keamanan kawasan. Keempat unsur tersebut adalah:

1. Unsur *boundary* yang memilah satu kawasan dengan kawasan di sekelilingnya
2. Unsur interaksi di dalam struktur yang anarki dalam kawasan
3. Distribusi kekuasaan disertai konfigurasi di sebuah kawasan dalam cakupan unsur *polarity*
4. Unsur konstruksi sosial untuk menjelaskan kecenderungan dari *amity* atau *enmity*.



Sebagai suatu hal yang kompleks, menilai interaksi negara dalam kawasan perlu mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan karena saling terikat dan memengaruhi yang akhirnya membentuk pola interdependensi. Contoh nyata dari kompleksnya isu keamanan yang berkaitan dengan kawasan ini dapat dilihat dari interaksi *enmity* yang melibatkan identitas, kepentingan hingga historis adalah hubungan Arab-Israel, Vietnam-Khmer & India-Pakistan. Begitupula sebaliknya pola *amity* dapat ditemukan di hubungan antar negara seperti Rusia-Tiongkok atau Australia-Selandia Baru.

Unsur-unsur tersebut kemudian bergerak dinamis melalui proses sekuritisasi serta desekuritisasi yang dilakukan oleh negara. Proses sekuritisasi, kemudian akan menunjukkan keunikan kompleks keamanan regional, dibandingkan dengan teori kompleks lainnya. Untuk beberapa kasus seperti fenomena kawasan di Asia Tengah, bahkan terdapat “sekuritisasi saling ketergantungan” di tingkat regional (Pratama, 2013). Melalui proses artikulasi kebijakan yang komperhensif, isu-isu keamanan tadi akhirnya menghasilkan interaksi berupa konflik persaingan maupun kerja sama yang bersifat eksklusif.

Pada akhirnya, RSCT oleh Barry Buzan dan Ole Waever menunjukkan bahwa analisis dinamika keamanan di tingkat regional akan mampu menangkap gambaran yang lebih mendalam tentang pola hubungan keamanan yang terjadi di kawasan, dan juga interaksi antara mereka dengan negara-negara di luar kawasan, termasuk hubungannya dengan kekuatan besar dan/atau negara adidaya di tingkat global. Maka dari itu, penulis akan berusaha membedah fenomena hubungan erat antara Australia

dengan Amerika Serikat terdapat unsur *amity* di dalamnya yang berlangsung sejak awal berdirinya Australia melalui RSCT Barry Buzan. Dalam buku “*Fear of Abandonment*”, Allan Gyngell menggambarkan bagaimana Australia telah membentuk dunia dan dunia yang dibentuk oleh Australia sejak Australia independen tahun 1942 dari Inggris. Gyngell berpendapat bahwa terdapat ketakutan akan ditinggalkan –awalnya oleh Inggris, dan kemudian oleh sekutu yang paling kuat, Amerika Serikat– telah menjadi pendorong penting bagaimana Australia bertindak di dunia internasional (Gyngell, 2017). Pola *amity* Australia-Amerika Serikat di sisi lain berjalan beriringan dengan pola *enmity* Australia-Tiongkok yang menyebabkan saling curiga secara keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini diharapkan mampu membedah hubungan yang berlangsung begitu lama tersebut serta dinamika dan sekuritisasi yang terjalin di dalamnya. Penelitian ini berupaya mengelaborasi faktor-faktor yang mendukung terinisiannya AUKUS dengan segala resiko dan akibat yang didapatkan.

### 1.4.2 Konsep *Offshore Balancing*

*Offshore Balancing* atau dalam bahasa Indonesia penyeimbangan lepas pantai merupakan konsep sentral dalam studi keamanan internasional yang diilhami oleh penganut realisme, sebuah konsep strategis yang digunakan dalam studi ilmu hubungan internasional (Kolasi, 2019). Konsep ini merujuk pada strategi tertentu yang digunakan oleh *great power* dalam upayanya meredam bangkit atau munculnya *regional power* yang berpotensi mengganggu pengaruh *great power* sebagai hegemon regional bahkan lebih jauh internasional<sup>3</sup>. Karena *offshore balancing* bagian dari studi keamanan yang berisi tentang penggunaan ancaman dan kontrol kekuatan militer dia dapat digolongkan berasal dari pendekatan yang tradisional (Walt, 1991).

Pada mulanya konsep strategi dari *offshore balancing* ini berakar dari strategi Kerajaan Inggris pada akhir abad kesembilan belas, ketika para pemimpin Inggris secara samar-samar melihat adanya penurunan dalam dominasi global Kerajaan mereka. Salisbury menyampaikan gagasan yang menangkap sinyal bahwa melalui strategi ini akan lebih memperburuk penurunan kekuatan Inggris dan penolakannya; "Apa pun yang terjadi akan menjadi lebih buruk" (Layne, 1997). *Grand Strategy* ini kemudian diadopsi oleh *great power* lain di masanya masing-masing seperti Amerika Serikat maupun Jepang (Keenan, 2012).

Untuk Amerika Serikat, strategi raya ini digunakan mulanya pada tahun 1930-an. Kebijakan "*Lend-Lease*" yang diperkenalkan Presiden Roosevelt dianggap

---

<sup>3</sup> *Great Power*: Kekuatan Besar, negara yang memiliki pengaruh signifikan, *Regional Power*: Kekuatan Regional, negara yang memiliki peran dalam kancah regional

sebagai bagian dari penyeimbangan lepas pantai. Inisiasi kebijakan bernama resmi “*An Act to Promote the Defense of the United States*” (Ebbert, Hall, & Beach, 1999). Bergaris besar di mana Amerika Serikat tidak menjual melainkan meminjamkan perlengkapan militer mereka ke negara lain, salah satunya ke Inggris Raya yang akan mereka gunakan dalam perang melawan Jerman. Jenis pembayaran tidak harus dalam bentuk uang segar melainkan dalam bentuk apapun sesuai keinginan Amerika Serikat termasuk dukungan politik dan militer yang mendirikan pangkalan militer di wilayah sekutu. Amerika Serikat melakukan sekuritisasi dengan mengartikulasikan kebijakannya sebagai *Arsenal of Democracy not fighter for it* (Seidl, 2016). Kebijakan untuk memasok minyak, makanan kapal/pesawat tempur dan berbagai material pendukung perang berlangsung dari tahun 1941 hingga 1945 dengan berbagai kesepakatan tidak hanya dengan Inggris (*Commonwealth*), Tiongkok, Uni Soviet hingga Prancis sebagai negara sekutu saat itu (McNeill, 1953).

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan strategi raya *offshore balancing* ini tidak terlepas dari niat untuk Amerika Serikat tetap memiliki pengaruh (militer) di berbagai belahan bumi namun tidak secara langsung mengorbankan nyawa orang Amerika Serikat. *Offshore balancing* juga diharapkan mampu mereduksi potensi terorisme yang bisa menyerang Amerika Serikat (Mearsheimer & Walt, 2016). Strategi raya ini diaktifkan beberapa kali, termasuk saat Perang Iran-Irak 1980-1988 dan selama Perang Dingin melawan Blok Timur.

Sederhananya melalui *offshore balancing*, memperbolehkan *great power* untuk membentengi pengaruh dan kekuatannya tanpa biaya pengerahan militer besar

di berbagai penjuru dunia. Penyeimbangan lepas pantai ini cuma dapat diaplikasikan secara efektif oleh negara-negara kepulauan dan negara yang menganut *isolationism*, seperti Amerika Serikat. Aplikasi dari strategi ini dengan catatan di mana ketika ada sebuah ancaman yang potensial, akan menyerahkan terlebih dahulu tanggung jawabnya kepada otoritas lokal, intervensi dilakukan bila ancamannya terlalu besar dan tidak mampu ditangani sekutu di kawasan tersebut.

Untuk Amerika Serikat, strategi ini membuat negara-negara sekutu untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di wilayah geopolitik strategis namun tetap memiliki pangkalan militer yang selalu siaga, dapat terlihat dari penempatan Komando Geografis Amerika Serikat di beberapa kawasan. Contohnya Eropa & Teluk Persia. Eropa merupakan pusat industri utama dunia, diisi mitra utama Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya, untuk wilayah ini selain memiliki Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Amerika Serikat memiliki *United States European Command* atau EUCOM. Teluk Persia merupakan pasar minyak global, Amerika Serikat mengandalkan *United States Central Command* (USCENTCOM atau CENTCOM) untuk wilayah ini. Berkaitan dengan penelitian ini yang mengambil kawasan Indo-Pasifik sebagai rujukan utama, Amerika Serikat memiliki Komando Geografis di kawasan ini bernama *United States Indo-Pacific Command* (USINDOPACOM) yang membuktikan keseriusan Amerika Serikat di kawasan ini mengingat nama sebelumnya dari komando geografis ini adalah *United States Pacific Command* (USPACOM).

Untuk itu penelitian ini akan menggunakan teori *offshore balancing* dari Christopher Layne yang melihat upaya negara *great power* menyeimbangkan kekuatannya di kawasan yang jauh dari jangkauan total militernya namun tidak secara langsung berhadapan dengan “musuhnya”. Kesepakatan militer yang dijalin Amerika Serikat dan Australia yang berlangsung sejak lama dari ANZUS hingga AUKUS merupakan upaya dari Amerika Serikat untuk mendukung sekutunya untuk menghadapi lawan atau calon lawannya di kawasan yang ditempati Australia dengan menyuplai peralatan militer hingga peningkatan sumber daya militer. Strategi ini sangat berpotensi mempertahankan predikat *primus inter pares* bagi sebuah kekuatan besar di tengah sistem internasional yang secara formal anarki.<sup>4</sup> Tapi di sisi lain memiliki dampak negatif yang tidak kalah berpotensi yang menurut Layne, negara yang menggunakannya harus mempertimbangkan secara matang. Penelitian ini diharapkan mampu melihat secara nyata apakah yang dilakukan Amerika Serikat mewujudkan/digolongkan sebagai aplikasi dari teori *offshore balancing* di kawasan Indo-Pasifik dan memperkirakan dampak berkelanjutannya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif eksplanatif dipilih agar mampu memberikan penjelasan mengapa sesuatu

---

<sup>4</sup> *Primus Inter Pares*: frasa Latin artinya yang pertama di antara yang sederajat atau yang pertama di antara yang setara.

bisa terjadi. Penelitian eksplanatif ini menekankan pada pengujian hipotesa untuk menemukan sebab suatu fenomena. Tujuannya untuk mengaitkan pola-pola yang memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola sebab akibat dalam permasalahan dari suatu fenomena. Penelitian ini akan berfokus pada analisis hubungan antar-variabel (Singarimbun & Effendi, 1981). Penelitian dengan metode ini menurut Bungin tidak akan menekankan kedalaman data asalkan dapat merekam data dari populasi yang luas (Bungin, 2001).

Berkaitan dengan metode ini penulis akan berusaha melakukan eksplanasi atas alasan di balik mesranya hubungan Amerika Serikat & Australia dalam bidang pertahanan.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah dengan menggunakan teknik *literature review* atau studi pustaka. Melalui teknik ini penulis akan mengumpulkan data dari beberapa sumber literasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas penulis. Analisis dan riset yang dilakukan penulis dilakukan melalui data primer serta sekunder. Penulis mengumpulkan data tersebut melalui sarana daring. Untuk data primer berupa dokumen dan laporan resmi didapatkan dari laman resmi pemerintah termasuk Australia serta Amerika Serikat dan atau asesmen lembaga resmi non-pemerintah seperti ASEAN dan lain sebagainya. Sementara data sekunder didapatkan melalui sumber kredibel seperti buku dan hasil penelitian *think-tank*.

### **1.5.3 Teknik Analisis Data**

Data dari hasil penelitian akan diolah dengan teknik deskriptif eksplanatif. Dengan teknik ini penelitian ini menganalisis dan menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian dan mengkonversinya menjadi sebuah kesimpulan dan penjelasan dari penelitian tersebut.

### **1.5.4 Tahapan Penelitian**

Penelitian ini akan melalui tahapan sebagai berikut

- 1) Memahami ide utama dari penelitian.
- 2) Menelusuri informasi terkait serta mencari sumber mendukung subjek penelitian.
- 3) Membuat spesifikasi lokasi penelitian serta klasifikasi untuk bahan yang dipakai dalam penelitian.
- 4) Membedah data dan fakta atas bahan penelitian yang dikumpulkan.
- 5) Membuat simpulan melalui penelitian akademis berpondasi pada bahan yang telah diteliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perangaruh Kompleksitas Keamanan Regional Terhadap Stabilitas Suatu**

##### **Kawasan**

Perilaku negara-negara di dunia pasca perang dingin yang semakin berkembang dan terkadang tidak dapat diprediksi serta dibedah oleh para pemikir hubungan internasional karena pola hubungan internasional yang terjadi tidak dapat dilihat secara parsial hanya dari *point of view* negara saja melainkan harus secara holistik memandangnya sebagai bagian dari sebuah sistem kawasan yang kompleks membuat teori *regional security complex* menjadi konsep yang terus berkembang sebagai sarana para pemikir-sarjana ilmu hubungan internasional modern dalam melihat suatu fenomena hubungan internasional. *Regional security complex* yang disingkat RSCT menjadi relevan digunakan dalam berbagai kondisi atau peristiwa hubungan internasional yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi pada suatu kawasan.

Sesuai dengan nama dan lini kajiannya, teori ini cenderung kompleks dalam melihat suatu fenomena karena mempertimbangkan begitu banyak aspek. Sebuah kawasan terbentuk tidak hanya karena aspek geografis melainkan terdapat berbagai entitas dan sub-entitas di dalamnya. Mulai dari identitas dipilih dan terbentuk hingga pola *enmity & amity* yang tidak hanya menjadi bumbu dalam interaksi tetapi merupakan dasar arah dari interaksi antar negara di suatu wilayah. Bila penjelasan lengkap mengenai teori ini sudah dikemukakan pada kerangka konseptual, pada bagian ini akan melihat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan RSCT

sebagai pisau bedah penelitian sebuah fenomena interaksi antar-negara pada tataran kawasan.

Seperti yang disinggung di awal sub-bab, penggunaan RSCT yang mulai masif digunakan sangat dipengaruhi oleh dinamika dunia pasca perang dingin. Barry Buzan, sang peramu teori ini sendiri yang membedahnya melalui pembahasan “*The Logic of Regional Security in the Post-Cold War World*” dalam bukunya “*The New Regionalism and the Future of Security and Development*” (Buzan, 2000). Buzan pada pembahasannya mengeksplorasi masalah penggunaan analisis regional untuk memikirkan agenda keamanan dunia pasca Perang Dingin dimulai dengan ringkasan teori kompleks keamanan tradisional, dengan fokus militer-politiknya dan logika regionalisasi yang kuat serta melihat bagaimana pandangan itu masih relevan di dunia hari ini.

Meninjau perubahan dalam sifat agenda keamanan, Buzan melihat terdapat keamanan ekonomi dan lingkungan yang menjadi jenis ancaman baru dan objek rujukan baru dalam meninjau keamanan kawasan yang kompleks. Terdapat penurunan perhatian pada isu keamanan tradisional (militer-politik) di antara negara-negara besar. Terdapat tiga dari sektor keamanan baru yakni ekonomi, lingkungan dan (gerakan) sosial yang mengandung logika regionalisasi. Melalui RSCT, Buzan mampu melihat manfaat dari mengelompokkan sektor-sektor atau entitas tadi secara terpisah atau menggabungkannya secara sekaligus menjadi satu kompleks keamanan multi-sektoral. Secara garis besar, pasca perang dingin dalam melihat keamanan regional yang kompleks terdapat aspek non-tradisional yang terus berkembang dan tidak dapat terpisahkan dalam proses analisisnya sebagai sebuah fenomena.

Bukan hanya peristiwa Perang Dingin yang mempengaruhi kompleksitas keamanan sebuah kawasan, peristiwa penting di dunia juga bisa memengaruhi kompleksitas sebuah kawasan. Sebuah tesis yang berjudul “*An Analysis of The Regional Security of South Asia in Post 9/11 Period: Regional Security Complex Theory Approach*” karya Oisur Rahman dari Eastern Mediterranean University mencoba menganalisis bahwa pasca peristiwa 9/11, keamanan regional di kawasan Asia Selatan telah terpengaruh karena perang global melawan teror yang dipimpin Amerika Serikat telah meningkatkan keamanan regional atau telah mengubah Asia Selatan menjadi kawasan yang lebih rentan (Rahman, 2015). Hal tadi kemudian dijadikan sebagai hipotesis dan pertanyaan penelitian yang dijawab dengan mengacu pada kerangka RSCT pada penelitian tersebut.

Ide sentral dalam RSCT menyatakan mayoritas ancaman berjalan lebih mudah dalam jarak pendek daripada jarak jauh, interdependensi keamanan pun lumrahnya dipolakan ke dalam kelompok berbasis regional. Hal inilah yang dalam penelitian Oisur Rahman menggali kompleksitas keamanan di kawasan Asia Selatan pasca 9/11 sebagai studi kasus kawasan yang sebelumnya hanya berfokus pada periode pasca perang dingin.

Selain Asia Selatan terdapat beberapa kawasan lain yang bisa ditelisik pola hubungan antar-negara di dalamnya melalui RSCT. Ruth Hanau Santini melalui “*A New Regional Cold War in the Middle East and North Africa: Regional Security Complex Theory Revisited*” membedah bahwa sejak perang Irak 2003, Timur Tengah dan Afrika Utara telah memasuki Perang Dingin Regional Baru, yang ditandai oleh dua logika yang bersaing: di satu sisi, politisasi sektarianisme menentang blok Sunni

pimpinan Saudi melawan blok Syiah pimpinan Iran. Pada sisi lain, perpecahan Intra-Sunni seputar mobilisasi politik identitas (islam), yang diwujudkan oleh Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya melawan musuh-musuhnya. Ruth Hanau Santini berusaha memadukan RSCT dengan gagasan Donnelly tentang heterarki dan membedahnya pada fenomena perang dingin yang dialami kawasan tersebut, persamaan dan perbedaan antara Perang Dingin Arab tahun 1950-an sampai dengan 1960-an (Santini, 2017).

Salah satu wilayah yang sangat kompleks yang menarik dibedah melalui RSCT ialah kawasan Balkan khususnya bagian Barat. Pejic dari RUDN University di Moscow mencoba membedahnya dalam “*Western Balkans In The Light of Regional Security Complex Theory*”. Pejic menganalisis masalah keamanan internasional akut di sub-kompleks Balkan Barat menggunakan RSCT. Penelitian Pejic tidak hanya untuk mengidentifikasi elemen kunci dan fitur utama RSCT, tetapi juga untuk membentuk gagasan tentang Balkan Barat sebagai wilayah yang sangat heterogen dan sarat akan konflik (Pejic, 2016).

Dengan tujuan untuk mengkonfirmasi RSCT pada sub-kompleks Balkan Barat, Pejic menganalisis dalam empat tingkatan RSCT. Melalui RSCT, membedah hubungan antar negara di kawasan, hubungan kawasan dengan kawasan tetangga dan peran kekuatan global di kawasan. Dari hasil penelitian, Pejic memberikan tiga skenario yang memungkinkan sub-kompleks Balkan Barat menjadi bagian dari Kompleks Regional Eropa di masa depan. Kesimpulan utamanya menekankan bahwa Balkan Barat mempertahankan kekhususannya, yang memerlukan studi terpisah dan pendekatan khusus dan juga menegaskan bahwa RSCT adalah alat metodologis

efektif yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses politik internasional regional di bidang keamanan Balkan Barat.

Salah satu wilayah besar yang terpecah-pecah yang terdiri dari negara-negara yang terfragmentasi yakni Kaukasus Selatan juga menjadi objek dari salah satu penelitian yang memakai RSCT sebagai pisau bedah. Sebuah buku berjudul “*Fear, Weakness and Power in the Post-Soviet South Caucasus*” karya Kevork Oskanian berhasil memberikan analisis multi-level keamanan internasional di Kaukasus Selatan (Oskanian, 2013). Menggunakan RSCT yang telah dikembangkan, mempelajari kondisi material dan wacana ketidakamanan dalam penilaiannya tentang kemungkinan transisi kawasan menuju masa depan yang lebih damai.

Kevork Oskanian menggambarkan apa yang terjadi di Kaukasus Selatan adalah kompleksitas regional yang mengeksplorasi keprihatinan para aktor utama kawasan. Kevork Oskania menerapkan pendekatan terhadap konflik-konflik di Kaukasus Selatan, menyentuh landasan baru dalam penyelidikan sejarahnya yang menyeluruh tentang pola-pola *amity & enmity*. Melalui pembedahan yang tepat memungkinkan untuk penggambaran yang mendalam tentang kemungkinan skenario masa depan, yang menampilkan, persaingan Armenia dengan Azerbaijan, dampak nilai-nilai Barat dalam membentuk identitas politik Georgia, dan munculnya rezim keamanan yang lebih stabil. Kevork Oskania berhasil membuka jalan baru dalam menggunakan RSCT untuk mengungkap "simpul Gordia" hubungan di Kaukasus

Selatan.<sup>5</sup> Dia tidak hanya memperdalam pemahaman dimensi regional dalam teori hubungan internasional, tetapi juga mengungkap pola interaksi keamanan yang lebih dalam di wilayah yang telah lama dikenal karena kompleksitas dan ketidakstabilannya.

RSCT juga tidak lepas dari kritik, masih terdapat beberapa celah dari teori versi asli dari Buzan dan Wæver dalam membedah masalah regional tertentu. Pembedahan keamanan regional di Afrika Timur contohnya. Barney Welsh dalam “*Revisiting Regional Security Complex Theory in Africa: Museveni’s Uganda and Regional Security in East Africa*” berpendapat bahwa RSCT dapat ditingkatkan dengan memasukkan artikulasi yang lebih jelas tentang bagaimana para pemimpin Afrika menegaskan pengaruh di dalam dan membentuk dinamika keamanan regional di Afrika. Barney Welsh melakukan penelitian selama lebih dari empat tahun dan lebih dari seratus wawancara kerja lapangan di Afrika Timur dan Afrika Selatan bersama spesialis keamanan regional, politisi, personel militer, pejabat pemerintah, jurnalis, akademisi, pelaku dan ahli ekonomi (Welsh, 2020). Barney Welsh menyoroti peran unik dan berpengaruh Presiden Museveni dalam membentuk dinamika keamanan regional di Afrika Timur yang pada periode penelitian 2011-2015 sangat dinamis. Artinya ada peran besar pemangku kepentingan di situ, ini yang sedikit terlewat dari RSCT versi original.

---

<sup>5</sup> Simpul atau katan Gordia adalah sebuah legenda dari Gordium, Firdia yang dikaitkan dengan Alexander Agung. Ini sering kali dipakai sebagai kiasan untuk masalah pelik diartikan sebagai ikatan yang "tak memungkinkan" yang diselesaikan secara mudah dengan menemukan celah atau berpikir kreatif ("memotong simpul Gordia")

Beralih ke kawasan Mediterania, “*The Ambitious Insulator: Revisiting Turkey's Position in Regional Security Complex Theory*” dari André Barrinha mengemukakan menurut RSCT, Turki adalah negara isolator karena berada di persimpangan kompleks keamanan yang berbeda tanpa benar-benar menjadi bagian dari mereka. Pemahaman tentang posisi Turki di bidang keamanan internasional ini telah menawarkan kontribusi perdebatan bagi para ahli yang mendebatkan tentang keselarasan keamanan negara antara Timur dan Barat. Turki, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi lebih aktif di panggung internasional, mendiversifikasi hubungannya dan mengambil sikap yang lebih tegas mengenai masalah keamanan internasional.

Pergeseran kebijakan luar negeri dan keamanan ini terkait dengan ambisi negara untuk menjadi kekuatan besar dalam waktu dekat. Namun, menurut RSCT, sangat tidak mungkin ada keadaan isolator yang juga berkekuatan besar (Barrinha, 2014). Sehingga berangkat dari penelitian ini menarik melihat perkembangan bagaimana Turki perlahan mampu menjadi negara isolator yang bertindak sebagai kekuatan besar sekaligus mengikis salah satu ide RSCT yang mengatakan negara isolator memang tidak akan bisa menjadi kekuatan besar.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas yang mampu membedakan permasalahan regional yang begitu kompleks, membuat penulis memilih *regional security complex theory* sebagai alat bedah paling relevan dalam membedah hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan Australia dengan Republik Rakyat Tiongkok yang berkaitan erat dengan stabilitas kawasan di Indo-Pasifik.

## **B. *Offshore Balancing* sebagai *Grand Strategy* Amerika Serikat**

Penyeimbangan lepas pantai atau *offshore balancing* acapkali digunakan kekuatan besar untuk menyebarkan dan mempertahankan pengaruhnya ke seluruh dunia khususnya di bagian belahan bumi yang lain dari wilayahnya. *Grand strategy* atau strategi raya ini juga digunakan oleh Amerika Serikat bahkan sejak dahulu. Pada subbagian ini akan berfokus melihat penelitian mengenai bagaimana strategi ini diadopsi oleh kekuatan besar khususnya Amerika Serikat dalam kerja hubungan internasional mereka.

Mulanya teori yang berangkat dari strategi ini dilakukan oleh Kerajaan Inggris sebagai hegemon di masa lampau. Di masa jayanya, Kerajaan Inggris mampu menguasai daerah-daerah di berbagai belahan bumi dan mendirikan koloni-koloni yang tunduk dan patuh dengan perintah Kerajaan. Namun setelah terjadi pergeseran pandangan politik sejalan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru membuat hegemoni Kerajaan Inggris terkikis. Kerajaan Inggris juga perlahan mengadopsi kebijakan netralitas yang kental dengan norma non-intervensi. Pergeseran hegemon itu ditangkap secara jelas oleh Richard Little melalui "*British Neutrality versus Offshore Balancing in the American Civil War: The English School Strikes Back*" melihat dari contoh kasus Civil War di Amerika adalah ujian penting untuk realisme ofensif karena itu adalah kesempatan terakhir Kerajaan Inggris dapat mencegah Amerika Serikat menjadi hegemon regional dengan penyeimbangan lepas pantai yang dapat dilakukan oleh Kerajaan.

Sebaliknya, Kerajaan Inggris menggunakan norma nonintervensi untuk membenarkan kebijakan netralitas yang tadi disinggung di awal (Little, 2016).



Penelitian ini secara jelas melihat ujian moral kompas Kerajaan Inggris yang di satu sisi ingin tetap menjadi hegemon namun di sisi lain perlu diakui pentingnya pendekatan regionalisasi ofensif realis terhadap sistem internasional kala itu. Penelitian menegaskan merincikan bahwa meskipun ada kekhawatiran tentang hegemoni regional, Kerajaan Inggris secara tegas dibatasi oleh pertimbangan normatif.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa kendala sosial ternyata lebih kuat daripada yang sistemik dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penyeimbangan lepas pantai merupakan strategi yang paling relevan yang dapat digunakan suatu negara adidaya untuk mempertahankan kekuatannya, setidaknya untuk periode tersebut. Fenomena Kerajaan Inggris yang gagal memaksimalkan strategi penyeimbangan lepas pantainya secara penuh sehingga mengakibatkan *domino effect* lepasnya status adidaya mereka di kemudian hari ke mantan koloninya sendiri membuat Amerika Serikat belajar banyak tentang hal tersebut.

Amerika Serikat yang dewasa sebagai negara adidaya memiliki beberapa strategi raya, beberapa periode secara jelas terlihat dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat bahwa pemerintah memilih penyeimbangan lepas pantai sebagai strategi raya mereka, sebuah kebijakan yang perlahan berkembang dan digolongkan sebagai strategi raya. Amerika Serikat akan menahan diri dari keterlibatan signifikan dalam urusan keamanan di luar negeri kecuali untuk mencegah suatu negara membangun hegemoni dalam apa yang diidentifikasi oleh John J. Mearsheimer dan Stephen Walt sebagai tiga wilayah strategis utama dunia: Eropa Barat, Asia Timur Laut, dan Teluk Persia. Strategi ini menganjurkan kehadiran luar negeri yang berkurang secara

signifikan dibandingkan dengan hegemoni liberal (strategi raya mereka yang lain), tetapi berpendapat bahwa intervensi diperlukan dalam beberapa bahkan lebih banyak keadaan tertentu ketimbang *grand strategy* “*restraint*.”

Penyeimbangan lepas pantai dikaitkan erat dengan teori realis ofensif tentang perilaku negara: ia percaya bahwa penaklukan sering kali dapat memungkinkan negara untuk mendapatkan kekuasaan, dengan demikian hegemon di wilayah dengan ekonomi besar, populasi tinggi, atau sumber daya kritis dapat dengan cepat menjadi ancaman global bagi nasional negara adidaya dalam hal ini Amerika Serikat (Mearsheimer & Walt, 2016). Sebagaimana yang disebutkan, salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus ialah Teluk Persia. Dalam makalah Christopher Layne berjudul “*America’s Middle East Grand Strategy after Iraq: the Moment for Offshore Balancing has Arrived*” berpendapat bahwa terdapat konsensus yang muncul di antara kaum realis bahwa Amerika Serikat harus meninggalkan strategi hegemoniknya dan mengadopsi strategi penyeimbangan lepas pantai (Layne, 2009).

Di sini, fenomena Irak dan kebijakan Amerika Serikat yang disebut *war on terror* telah menjadi katalisator. Layne menekankan bahwa Amerika Serikat di Teluk Persia atau kawasan Timur Tengah disertai kehadiran militer justru telah memicu terorisme dan menyebabkan Iran berusaha membela diri untuk memperoleh kemampuan senjata nuklir. Berdasarkan pengamatan Layne (kala itu), sejumlah realis terkemuka berpendapat bahwa strategi terbaik bagi Amerika Serikat adalah melepaskan diri dari Irak, mengurangi jejak regionalnya, dan mengadopsi strategi penyeimbangan lepas pantai. Christopher Layne sendiri jauh hari sebelumnya di tahun 2002 dalam artikel berjudul “*Offshore balancing Revisited*” sudah

mengungkapkan bahwa hegemoni Amerika Serikat adalah pedang bermata dua. Layne kala itu menegaskan strategi besar Amerika Serikat di masa depan setelah 11 September, penyeimbangan lepas pantai harus menjadi strategi untuk meneruskan keunggulan Amerika Serikat (Layne, 2002).

Salah satu wilayah yang tidak lepas dari penyeimbangan lepas pantai Amerika Serikat ialah Asia Selatan. Lloyd I. Rudolph dan Susanne Hoerber Rudolph dalam artikel berjudul “*The Making of US Foreign Policy for South Asia: Offshore Balancing in Historical Perspective*” menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Asia Selatan ini tentang *offshore balancing* dapat dikaji dari perspektif sejarah. Ini mencakup periode perang dingin ketika Amerika Serikat mendukung Pakistan melawan India hingga meninjau kebangkitan mereka, periode pasca perang dingin ketika pemerintahan Clinton tampaknya bersedia untuk memberikan pengakuan atas dominasi militer, ekonomi dan diplomatik India yang luar biasa di wilayah tersebut. Juga periode pasca 9/11 di mana India cenderung "ikut-ikutan" dengan satu-satunya negara adidaya di dunia kala itu (Rudolph & Rudolph, 2006).

Bersama berbagai periode pemerintah Amerika Serikat menggunakan penyeimbangan lepas pantai sebagai bagian bahkan pondasi dari kebijakan luar negeri mereka membuat penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik dapat dibedah melalui konsep tersebut sekaligus dapat meninjau penelitian yang berjudul “*An Ocean Too Far: Offshore Balancing in the Indian Ocean*” karya James R. Holmes yang melihat bahwa penyeimbangan lepas pantai di Samudra Hindia, bagian besar dari Indo-Pasifik sama sekali tidak seimbang.

Hal ini menurut Holmes berbeda dari benua Eropa Barat dan Asia Timur yang secara geografis lebih mudah diakses. Sehingga tantangan utama dari adopsi penyeimbangan lepas pantai di kawasan ini justru pada taran sistemik (Holmes, 2012).

### C. Upaya Mewujudkan Keamanan Strategis Di Indo-Pasifik

Perkembangan pesat Republik Rakyat Tiongkok di bidang ekonomi, politik dan keamanan khususnya di wilayah Indo-Pasifik dan dunia pada umumnya berhasil mengubah konstelasi hubungan internasional dan cara pandang sarjana ilmu ini. Justin Paul dalam tulisannya berjudul “*The Rise of China: What, When, Where, and Why?*” menelusuri bagaimana Tiongkok mampu bangkit dan perlahan menjadi hegemon dunia dimulai dari kawasan sekitarnya. Tiongkok telah muncul sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Paul J. , 2016).

Transisi global pasca terbit kembalinya negeri tirai bambu tersebut mampu melakukan perubahan secara radikal di pelbagai sektor, termasuk kawasan strategis dalam peta global. Label Indo-Pasifik menggantikan Asia-Pasifik sebagai kerangka dalam tatanan regional (Medcalf, 2018). Pendefinisian wilayah di Asia secara konseptual ini merupakan konsekuensi strategis dalam mengelola dan melihat kebangkitan Tiongkok sambil juga mengelompokkan Amerika Serikat ke dalam kawasan inklusif. Berbagai pemimpin telah menyekuritisasi terminologi ini seperti “*Act East*” dan “*confluence of two seas*,” menurut Rory Medcalf dalam “*Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific*” para pemimpin global menunjuk pada superregion maritim yang pusat geografisnya berada di Asia Tenggara. Ini berfungsi sebagai titik temu kepentingan setidaknya empat kekuatan utama serta kekuatan menengah dalam kawasan ini yang memiliki definisi mereka masing-masing. Indo-Pasifik ini sendiri menurut Rory pada hakikatnya melemahkan kemampuan satu negara secara sepihak untuk membentuk tatanan regional. Keterkaitan ekonomi dan

strategis wilayah dua samudera ini diterjemahkannya saling menguntungkan dan saling rentan di antara para aktor dalamnya.

Amerika Serikat yang meskipun bukan merupakan bagian dari kawasan Indo-Pasifik tetapi berperan terlebih dahulu sebagai “polisi dunia.” Amerika Serikat melihat dengan kehadiran Republik Rakyat Tiongkok diawali dari kawasan ini merupakan ancaman besar bagi predikat adidaya yang mereka, sehingga kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok mereka sekuritisasi sebagai ancaman bagi dunia. Apa yang terjadi selanjutnya ialah bahwa Amerika Serikat melakukan berbagai upaya untuk meredam dominasi Republik Rakyat Tiongkok di kawasan ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang coba mengangkat upaya perwujudan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Sebelum itu, melalui “*The Institutionalization of the Indo-Pacific: Problems and Prospects*,” Kai He & Huiyun Feng menegaskan meskipun istilah Indo-Pasifik telah menjadi populer dalam wacana kebijakan luar negeri beberapa negara, hingga jurnalnya terbit di Januari 2020, belum terdapat pembangunan institusi yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik (He & Feng, 2020).

Melalui studi kasus komparatif tentang pelebagaan Asia-Pasifik vs Indo-Pasifik, mereka berpendapat bahwa dua faktor penting berkontribusi pada lambatnya pelebagaan Indo-Pasifik sebagai sistem regional dalam politik dunia: kurangnya kepemimpinan ideasional dari komunitas epistemik dan kepemimpinan eksekutif yang lemah dari negara yang kuat. Sementara pemimpin ideasional dapat membantu negara mengidentifikasi dan memperluas kepentingan bersama dalam kerja sama, kepemimpinan eksekutif akan memfasilitasi negara untuk mengatasi hambatan

operasional dalam kerja sama, seperti masalah tindakan bersama atau kolektif dan kekhawatiran akan keuntungan yang masih bersifat relatif. Pembangunan institusi di Indo-Pasifik akan bergantung pada apakah dan bagaimana peran kepemimpinan ini dimainkan oleh pemangku kepentingan di kawasan ini. Keresahan keduanya yang tertuang dalam jurnal mereka tersebut seakan terjawab di September 2021.

Masyarakat dunia dikejutkan oleh konferensi pers tiga arah yang langka menampilkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertemu secara virtual, masing-masing di ibu kotanya sendiri untuk mengumumkan kemitraan keamanan trilateral yang ambisius dikenal sebagai AUKUS, yang menjanjikan hubungan militer dan sains yang lebih erat antara ketiga negara. Inti pakta itu adalah pengembangan bersama armada kapal selam Australia bertenaga nuklir. Program ini membutuhkan komitmen dari Washington untuk berbagi sistem propulsi nuklir (salah satu permata mahkota teknologi militer AS). Fakta bahwa AUKUS datang setelah penarikan Amerika Serikat yang berantakan dari Afghanistan, membuat beberapa analis Eropa mengklaim bahwa Amerika Serikat adalah sekutu yang tidak dapat diandalkan. Namun di Australia dan di sebagian besar sekutu di Asia, para pengamat menarik kesimpulan sebaliknya (Fullilove, 2022).

Michael Fullilove dalam tulisannya berjudul *“America and Australia Are Back on the Same Page”* melihat terlepas dari pendekatan *“America First”* mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk politik global, AUKUS menunjukkan bahwa komitmen Amerika Serikat kepada sekutunya dan kepercayaan sekutunya

kepada Amerika Serikat bertahan. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana tebal tipisnya hubungan Amerika Serikat dengan sekutu utamanya, Australia. Keduanya dengan terbentuknya AUKUS menandai peringatan 70 tahun aliansi AS-Australia. Sebagai satu-satunya negara yang berjuang bersama Amerika Serikat dalam setiap konflik besar abad kedua puluh dan kedua puluh satu, termasuk Perang Vietnam, Australia memiliki klaim yang baik sebagai sekutu Amerika Serikat yang paling dapat diandalkan. Dukungan publik yang kuat untuk aliansi ini adalah salah satu hasil yang paling konsisten dalam jajak pendapat Lowy Institute tentang kebijakan luar negeri Australia. Namun, beberapa tahun terakhir adalah tahun-tahun yang sulit bagi hubungan AS-Australia.

Di bawah Trump, Amerika Serikat menurut Fullilove diperintah dengan buruk, terpecah, tidak menarik, dan lemah (hal itu mengundang perilaku buruk oleh aktor-aktor seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia). Meskipun Negeri Kanguru terhindar dari tindakan terburuk Trump, pandangan dunia mantan presiden Amerika Serikat itu juga bertentangan dengan naluri orang Australia. Orang Australia percaya pada aliansi; Trump mengira sekutu adalah pengemis. Orang Australia cenderung ke arah internasionalisme; Trump memihak pada isolasionisme. Australia adalah negara perdagangan; Trump menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik dan menyerang Organisasi Perdagangan Dunia. Perbedaan-perbedaan ini dan tidak mendukungnya orang Australia terhadap Trump terlihat jelas dalam jajak pendapat Lowy Institute. Pada tahun 2020, hanya tiga dari sepuluh warga Australia yang memiliki keyakinan bahwa presiden Amerika Serikat akan melakukan hal yang benar dalam urusan dunia,



dan hampir tiga perempat warga Australia ingin Joe Biden memenangkan pemilihan presiden waktu itu.

Setelah kemenangan Biden, opini publik berbalik. Pada tahun 2021, hampir tujuh dari sepuluh orang Australia memiliki keyakinan bahwa Biden akan melakukan hal yang memihak pada Australia, meningkat 39 poin dibandingkan dengan hasil jajak pendapat untuk pendahulunya setahun sebelumnya. Kepercayaan kepada Amerika Serikat sebagai sebuah Negara juga pulih. Enam dari sepuluh orang Australia mengatakan bahwa mereka memercayai Amerika Serikat untuk bertindak secara bertanggung jawab di dunia internasional, meningkat sepuluh poin dari tahun 2020. Michael Fullilove berargumentasi bahwa Biden jauh dari pemimpin yang sempurna, tetapi gayanya mencerminkan perubahan yang jelas dalam kebijakan Amerika Serikat dan Orang Australia menghargai itu. Diplomasi Asia-nya mengingatkan pada strategi "sekutu pertama" mantan Presiden George W. Bush, yang memprioritaskan hubungan dengan teman-teman Amerika Serikat di kawasan ini. Sebaliknya, mantan Presiden Barack Obama dan Trump mengadopsi varian dari pendekatan "*China First*".

Dinilai Fullilove, Obama berpandangan bahwa Tiongkok tertarik untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memecahkan tantangan global seperti perubahan iklim, meskipun semakin banyak bukti yang bertentangan. Trump, ketika masanya tetap berusaha dekat dengan Tiongkok tetapi berperilaku tidak menentu: terkadang agresif dan menghina, di lain waktu haus untuk membuat kesepakatan dengan Presiden Xi Jinping. Sementara Biden terlihat lebih realistis tentang apa yang

bisa mereka dapatkan dari pemerintah Tiongkok dan lebih bersemangat untuk bekerja dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat terdahulu utamanya Australia. Contoh sederhananya ketika ingin bertemu dengan perwakilan Tiongkok, pejabat tinggi Biden bertemu dengan sekutu Amerika Serikat untuk memastikan mereka merasa nyaman dan yakin setelah pemilihan 2020. Baru saat itulah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan berunding dengan perwakilan Tiongkok pada pertemuan puncak Maret 2021 di Anchorage, Alaska. Bagi orang Australia, manfaat dari pendekatan “sekutu pertama” ini terlihat pada hari-hari pertama pemerintahan Biden.

Biden memulai masa jabatannya dengan mengadakan pertemuan pemimpin virtual pertama negara-negara Quad memberi sinyal Tiongkok bahwa perbaikan dalam hubungan AS-China dapat dilakukan dimulai dengan menghentikan pola ekonomi koersif Tiongkok ke Australia, sehingga Australia bias juga mengambil peran di Indo-Pasifik. Tiongkok digaribawahi oleh Fullilove telah memberlakukan pembatasan hukuman pada banyak ekspor Australia, termasuk, anggur, makanan laut, kapas, kayu, daging sapi, tembaga, dan batu bara, sebagai respon seruan Australia untuk penyelidikan internasional tentang asal usul pandemi COVID-19 . Tiongkok juga memberi Australia *silent treatment* dengan menanggukkan dialog dan menolak permintaan pertemuan resmi. Meskipun ada perdebatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perpecahan ini, alasan utama hubungan Australia dengan Tiongkok telah berubah adalah karena Tiongkok sendiri telah berubah. Dalam dekade

sejak aksesi Xi Jinping, kebijakan luar negeri negara itu telah mengeras, kesediaannya untuk mentolerir kritik internasional telah menghilang.

Australia, pada gilirannya, telah mengambil serangkaian langkah untuk melindungi kedaulatannya, termasuk melarang raksasa telekomunikasi Huawei untuk berpartisipasi dalam peluncuran 5G dan memperkenalkan undang-undang interferensi asing yang baru (yang akan terlihat korelasinya di akhir paragraf). Australia akhirnya meningkatkan pengeluaran pertahanan dan memperkuat hubungan dengan mitra yang berpikiran sama di kawasan, termasuk sesama anggota QUAD. Di atas segalanya, penurunan hubungan Australia-Tiongkok ini mendorong upaya untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Australia menggunakan perjanjian AUKUS untuk menandakan niatnya membentuk lingkungan eksternalnya dan mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional. Kapal selam bertenaga nuklir akan memberikan kekuatan “*deterrent*” yang signifikan bagi Australia terhadap ancaman luar. Fullilove menganggap AUKUS tidak lain dan tidak bukan dibuat oleh Tiongkok (hasil dari sikapnya terhadap Australia). Namun perlu diingat, AUKUS bukan hanya kesepakatan kapal selam. Perjanjian tersebut juga tentang berbagi teknologi, kemampuan siber dan kuantum baru, dan kecerdasan buatan.

Dari tulisan Michael Fullilove, Direktur Eksekutif Lowy Institute for International Policy yang begitu komprehensif ini dapat dilihat bahwa AUKUS merupakan sebuah langkah reformatif dan transformatif dari Amerika Serikat untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Australia, sang mitra murni dengan memanfaatkan hubungan yang kurang baik antara Australia dengan Tiongkok

sekaligus mengukuhkan payung kebijakan internasionalisme mereka dengan mengutamakan sekutu ketimbang praktek isolasionisme. Sayangnya, artikel ilmiah yang ditulis ini seakan mendiskreditkan peran Donald Trump, padahal visi Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik ini telah dirangkai sejak Trump. Sehingga masih banyak kesenjangan penelitian atau *research gap* yang bisa dieksplorasi lebih jauh dan tidak memihak pada kepentingan salah satu spektrum politik Amerika Serikat.

Tulisan yang dapat membantah kekhawatiran dan kritikan berlebih publik dan sarjana hubungan internasional kepada peran Trump (termasuk Fullilove tadi) untuk Indo-Pasifik ialah “*US Engagement in the Indo-Pacific: An Assessment of the Trump Era*” dari Harsh V. Pant dan Karshishs Parpiani. Makalah ini melakukan evaluasi keterlibatan Amerika Serikat di wilayah tersebut, dan menemukannya bertentangan dengan prediksi yang mengkhawatirkan dari berbagai kalangan. Pemerintahan Mantan Presiden Donald Trump telah menegaskan kembali komitmen terhadap sekutu tradisional, yang dibangun di atas keintiman Presiden pendahulu dengan mitra yang baru lahir, dan mendorong mitra untuk lebih vokal dengan posisi kebijakan mereka (Pant & Parpiani, 2020). Selain itu, sebagai pengecualian dari retorika *America First*, pemerintahannya telah merangkul pembiayaan pembangunan dan multilateralisme untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur regional. Juga mengorientasikan kembali keamanan nasional Amerika Serikat di sekitar 'persaingan kekuatan besar', pemerintahan Trump sebenarnya telah menempatkan Tiongkok di bawah tekanan di berbagai bidang. Argumentasi tersebut dapat dikuatkan dengan fakta bahwa United States Pacific Command (USPACOM) berubah menjadi United

States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) di 2018, masa pemerintahan Trump.

Tidak bisa dilupakan, sejalan dengan arah politik Amerika Serikat yang menjunjung internasionalisme, Inggris juga mentransformasikan dan menyekutisasi kebijakannya dengan istilah Inggris global. Inggris menyadari bahwa telah terjadi pergeseran geopolitik dan geoekonomi, termasuk bangkitnya kekuatan Tiongkok dan semakin pentingnya Indo-Pasifik bagi kemakmuran dan keamanan global serta potensi munculnya pasar baru dan pertumbuhan kelas menengah global (Pratita, 2022). Dalam mewujudkan eksistensi Inggris di dunia khususnya di kawasan Indo-Pasifik, Chika Kirana Budi Pratita dalam “*Security Dynamics of Southeast Asia: The Role of The UK & it’s Implications on Regional Security*” menegaskan Inggris memandang posisi strategis kawasan Asia Tenggara yang termasuk dalam empat pilar politik luar negeri Inggris. Asia Tenggara (pusat dari Indo-Pasifik) telah menjadi arena perebutan pengaruh kekuatan global. Peran Inggris di perjanjian ini tidaklah mayor tapi sedikit banyaknya menjadi faktor pendukung terinisiasinya perjanjian yang berusaha membendung pengaruh Tiongkok ini.

Terdapat sebuah penelitian yang juga mengangkat AUKUS dengan pisau bedah *offshore balancing*. Penelitian dari Fatih Bayezit berjudul “*The AUKUS Deal Through a Neoclassical Realist Lens: Offshore Balancing & Elite Perception*” melihat bahwa AUKUS sebagai dinamika aliansi baru dalam geopolitik Indo-Pasifik. Kesepakatan itu melihat Amerika Serikat menyediakan pengiriman kapal selam bertenaga nuklir buatan Amerika ke angkatan laut Australia adalah bagian dari

strategi perimbangan lepas pantai yang diharapkan dapat mendukung kebijakan regional Amerika Serikat dan Inggris (Bayezit, 2022). Akan tetapi terdapat *research gap* antara penelitian skripsi ini dengan penelitian dari Bayezit yang menggunakan *offshore balancing* sebagai bagian yang tidak terhindarkan dari kesepakatan AUKUS karena Bayezit berfokus pada evaluasi AUKUS melalui metode analisis realisme neoklasik yang memungkinkan analisis dari persepsi elit penguasa sehingga sebuah kebijakan terbentuk.

Joshy Paul juga coba mengungkapkan adanya penyeimbangan lepas pantai Amerika Serikat meski dari studi kasus yang berbeda. Sebuah jurnal berjudul “*US and India: Emerging offshore balancing in Asia*” memperlihatkan bahwa terdapat penyeimbangan lepas pantai di Indo-Pasifik yang dilakukan Amerika Serikat dengan India sebagai sekutu utama mereka. Amerika Serikat dan India yang belaknagn lebih dekat sehingga terjalin hubungan bilateral dalam pertumbuhan yang stabil. Di bawah pemerintahan Bush dan Obama, dan sekarang pemerintahan Trump juga, India menerima kepentingan signifikan dalam kebijakan strategis Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik. Kemunculan India sebagai kekuatan yang kredibel di kawasan Samudera Hindia telah membawa kedua negara semakin dekat. Hubungan tersebut juga terus berkembang sebagai akibat dari munculnya Tiongkok sebagai hegemon potensial di Asia (Paul J. , 2019).

Amerika Serikat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan posisinya yang lebih dominan di Indo-Pasifik dan membutuhkan sekutu yang kuat di kawasan itu untuk membantu berbagi beban. Dalam hal ini, India menjadi penyeimbang lepas pantai di Asia untuk melawan kemunculan Tiongkok sebagai hegemon potensial di

kawasan. *Research gap* dari penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini memanglah jelas ada pada studi kasus namun mampu memberikan gambaran bagaimana strategi penyeimbangan lepas pantai memang merupakan opsi yang digunakan karena paling relevan dari pihak Amerika Serikat.

Penelitian skripsi ini akan mencoba untuk memvisualkan beberapa hal yang belum dibahas dari penelitian-penelitian terdahulu, menarik benang merah antar penelitian maupun perbedaan waktu penelitian sehingga terdapat hal-hal baru yang dapat dieksplorasi lebih terkini.